

OPTIMASI PENDIDIKAN TINGGI PERTANIAN DALAM RANGKA *LINK AND MATCH* DENGAN DUNIA KERJA

*A.M. Akyas, Sadeli Natasasmita dan
Tuhpawana P. Sendjaya*

I. PENDAHULUAN

GBHN 1993 menggariskan bahwa titik berat pembangunan dalam PJP-II adalah bidang ekonomi, dicanangkan sebagai penggerak utama pembangunan, dengan unsur penunjang utamanya adalah pembangunan sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut empat bidang mendapatkan prioritas yang tinggi, yaitu industri, pertanian, koperasi, dan perdagangan. Selanjutnya, GBHN 1993 menggariskan bahwa pembinaan keempat bidang tersebut harus diarahkan kepada menghasilkan sumberdaya manusia yang produktif, yang dapat mengembangkan pertanian yang tangguh, industri yang kuat dan dapat bersaing, mengembangkan usaha koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju, dengan mendayagunakan sumberdaya alam secara optimal. Yang amat spesifik dari GBHN 1993 tersebut adalah pernyataan bahwa pembinaan keempat sektor andalan tersebut harus ditempuh melalui pembangunan manusianya (perhatikan kalimat *digarisbawahi*).

Menjelang akhir PJP-I, kita dirisaukan oleh semakin meningkatnya pengangguran dari lulusan pendidikan tinggi, termasuk kedalamnya lulusan pendidikan tinggi pertanian. Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara output sistem pendidikan dengan kesempatan kerja yang berkembang dalam sektor ekonomi (baca pertanian). Bila kita lacak lebih lanjut kesenjangan ini tampaknya disebabkan oleh dua hal. Sebab pertama, perkembangan sektor ekonomi kita tidak menciptakan tambahan kesempatan kerja yang sepadan dengan jumlah lulusan pendidikan tinggi (PT) pertanian. Sebab kedua, sistem PT Pertanian kita tidak *match* dengan tuntutan dunia kerja, atau tidak sepenuhnya terkait atau dikaitkan (*link*) dengan sistem ekonomi yang berkembang, khususnya dengan arah dan perkembangan pembangunan pertanian kita.

Fenomena tidak *link and match*-nya dunia pendidikan dengan dunia pembangunan dan dunia kerja ini tampaknya merupakan gejala umum, seperti yang dapat direkam dari hasil perumusan seminar yang baru-baru ini diselenggarakan di kampus Jatinangor, Universitas Padjadjaran, September

1993. Salah satu rumusannya menyatakan terdapat indikasi adanya *horizontal mismatch* dan *vertical mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia pembangunan. *Horizontal mismatch* yaitu adanya jenis lulusan yang jauh lebih banyak dari kebutuhan atau mungkin kurang atau bahkan tidak dihasilkan sama sekali oleh pendidikan tinggi. *Vertical mismatch* yaitu macam atau jenis lulusan dan jumlahnya sudah sesuai dengan tuntutan dunia kerja, namun kualifikasinya belum memadai.

Tulisan ini tidak akan mempermasalahkan secara langsung apakah benar dan seberapa banyak terjadi pengangguran lulusan PT Pertanian, atau seberapa jauh terjadi *horizontal mismatch* dan *vertical mismatch* antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Data untuk itu memang tidak mudah memperolehnya, kecuali bila diadakan penelitian yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun bahwa hal tersebut nyata ada/terjadi di lapangan, tampaknya kita semua menyetujuinya. Yang ingin kami lontarkan dalam diskusi ini adalah bagaimana PT Pertanian harus menjawab arah dan tuntutan GBHN tersebut di atas.

II. ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN MASA YANG AKAN DATANG (BACA: PJP II)

Kita dapat menyimak arah pembangunan pertanian masa yang akan datang (baca PJP-II) dari dua visi. Visi pertama adalah visi resmi dari Departemen Pertanian, dan kedua adalah visi yang dikembangkan dari strategy pembangunan nasional dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Visi pertama diberi judul Strategy Dasar Pembangunan Pertanian, yang merupakan cuplikan ringkas dari Sambutan Menteri Pertanian pada acara Pembukaan Simposium Nasional Organisasi Profesi & Asosiasi Bidang Pertanian dan Kongres V Peragi, tanggal 18 Mei 1993 di Jakarta. Visi kedua diberi judul Tantangan Global Pembangunan Pertanian.

III. STRATEGY DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN

Mengacu kepada trend perkembangan sektor pertanian selama PJP-I Departemen Pertanian, memprediksi pertumbuhan sektor pertanian selama Pelita VI sebesar 3,5 persen per tahun. Perkiraan ini dengan menggunakan asumsi bahwa ekonomi nasional tumbuh dengan sekitar 6,0 persen, berlanjutnya deregulasi ekonomi di mana harga-harga komoditas sesuai dengan harga pasar dunia, semakin berkembangnya globalisasi ekonomi, disertai pula dengan penurunan tingkat bunga investasi, serta laju inflasi berkisar antara enam sampai delapan persen per tahun.

Dengan pertumbuhan sektor pertanian 3,5 persen per tahun selama Repelita VI, maka pangsa PDB pertanian akan berkurang dari 16,37 persen pada awal Repelita VI menjadi 14,5 persen pada akhir Repelita VI.

Dalam skenario ini, subsektor peternakan tumbuh terbesar dengan laju 6,1 persen, disusul dengan subsektor perikanan dengan laju 5,2 persen dan subsektor perkebunan dengan laju 4,2 persen, sedangkan tanaman pangan hanya tumbuh dengan laju 2,6 persen per tahun.

Untuk mengimplementasikannya, digunakan strategy dasar pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu yang ditopang oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan azas keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan bagi setiap pelaku ekonomi, seperti petani, BUMN, dan swasta.

Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian merinci strategy dasar tersebut sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan senantiasa memperhatikan:
 - a. Kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kualitas keterampilan disertai dengan semangat kerja, disiplin, dan tanggung jawab;
 - c. Hubungan kelembagaan yang transparan serta adanya keseimbangan ekosistem dan pembangunan; dan
 - d. Peningkatan nilai gizi yang dinamis.
- (2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui efektivitas pendidikan dan pelatihan pertanian secara dinamis dan berimbang dengan orientasi program disesuaikan dengan potensi sumberdaya pertanian, wilayah dan keunggulan komparatif komoditas pertanian;
- (3) Melakukan desentralisasi pembangunan pertanian yang merupakan konsekuensi logis dari optimalisasi sumberdaya nusantara dalam rangka memperkuat daya saing bangsa melalui diversifikasi pertanian dan terobosan teknologi dengan memprioritaskan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*);
- (4) Memeratakan pembangunan yang diartikan bahwa setiap wilayah daerah nusantara dibangun sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Strategy ini diharapkan akan menumbuhkan saling keterkaitan dan saling menunjang antar daerah yang semakin tinggi dan didukung oleh pengembangan sumberdaya manusia disertai pelaksana pembangunan prasarana ekonomi;
- (5) Melakukan diversifikasi pertanian yang mencakup teknologi, sumberdaya, energi, tenaga kerja, pendapatan, produk dan pasar. Strategy ini mencakup kebijaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi, pengembangan agribisnis, kebijaksanaan harga, investasi prasarana dan pemasaran;

- (6) Menumbuhkan lembaga keuangan pedesaan yang fungsinya sangat strategis dalam memobilisasi dana masyarakat pedesaan. Lembaga ini perlu dijamin dengan peraturan bahwa lembaga tersebut dikelola dan dimiliki oleh masyarakat pedesaan;
- (7) Menerapkan demokrasi ekonomi di bidang pertanian, dengan menerapkan azas keseimbangan dalam hal pembagian risiko, peran dan keuntungan antara koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta.

Untuk menunjang strategi dasar pembangunan pertanian tersebut perlu dirakit satu kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian yang bersifat kondusif bagi pengembangan agroindustri di Indonesia, khususnya agroindustri skala kecil dan skala rumah tangga di masa mendatang. Untuk agroindustri skala besar, pada umumnya mereka telah memiliki kemampuan permodalan, manajemen, pemasaran, dan teknologi yang memadai, maka dukungan kebijaksanaan yang mereka perlukan lebih bersifat makro, antara lain adalah: (1) kemudahan dalam mengekspor produk agroindustri, (2) kemudahan dalam mengimpor sarana produksi, (3) kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, (4) perpajakan, (5) tataniaga dan pemasaran, dan (6) prasarana dan sarana.

Untuk agroindustri skala kecil dan skala rumah tangga masih perlu dirakit berbagai kebijaksanaan yang menyangkut: (a) harga dan sistem pemasaran produk pertanian, (b) investasi, (c) pola pembinaan kelembagaan agribisnis, (d) penelitian, dan (e) pendidikan dan latihan.

IV. TANTANGAN GLOBAL PEMBANGUNAN PERTANIAN

Arah pembangunan pertanian masa yang akan datang, dapat dibaca dari arah dan strategi pembangunan nasional, karena memang dunia pertanian adalah bagian integral dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem nasional.

Pembangunan Indonesia sejak Orde Baru yang dilakukan dengan lima kali Pelita, dikategorikan menjadi dua periode yang berbeda sekali coraknya (Aroef, M., 1993):

- (1) Periode pertama dengan orientasi pembangunannya adalah "swasembada" untuk bisa memenuhi kebutuhan dari hasil produksi sendiri (sistem ekonomi yang *inward looking*), dan orientasi pasarnya adalah pasar dalam negeri (1968-1985). Puncak keberhasilannya ditandai dengan suksesnya swasembada beras tahun 1984.
- (2) Periode kedua dengan corak orientasi pasar luar negeri (1985-sekarang), yang dipacu oleh berbagai deregulasi, debirokratisasi, deregulasi, dan kebijakan lain semacam itu.

Periodesasi itu merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan kita. Periode lima belas tahun pertama (1968-1985) telah berhasil meningkatkan pendapatan dari 80 US\$ pada tahun 1968 menjadi 520 US\$ pada tahun 1985, dan periode berikutnya meningkatkan pendapatan menjadi 620 US\$ (pidato Presiden, 16 Agustus 1993). Keberhasilan ini juga dapat disimak dari struktur perekonomian kita yang makin berimbang. Peranan sektor industri dalam produksi nasional meningkat dari 9,2 persen pada tahun 1969 menjadi 21,3 persen pada tahun 1991, sedangkan peranan sektor pertanian dalam produksi nasional pada tahun 1968 sebesar 49,3 persen menjadi 19,62 persen pada tahun 1991. Berbagai indikator keberhasilan tersebut makin memperteguh keyakinan kita untuk menghadapi kebangkitan nasional yang kedua, yaitu PJP-II. PJP-I - sebagai konsekuensi logis dari tingkat pembangunan yang telah dicapai dalam PJP-I - dicanangkan sebagai era industrialisasi. Berarti kita harus mentransformasikan masyarakat yang agraris ke masyarakat industri baru. Dalam sektor pertanian, hal ini berarti orientasi pada produksi pertanian bahan mentah dan setengah jadi menjadi masyarakat industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang kita miliki seproduktif dan seefisien mungkin. Untuk itu, dengan tepat sekali GBHN 1993 menggarisbawahi (yang dikutip pada awal tulisan ini) pembangunan harus diarahkan kepada *menghasilkan sumberdaya manusia yang produktif*. Jadi sekali lagi fokusnya adalah pembangunan sumberdaya manusia. Memang dengan berubahnya masyarakat dari agraris ke masyarakat industri baru, maka segala norma dan perilaku manusianya memerlukan berbagai penyesuaian. Dalam hal ini GBHN 1993 merumuskannya demikian:

Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Mengapa pilihan kita industri? Mengapa tidak tetap agraris? Bagaimana wujud sektor pertanian dalam era industri baru tersebut? Sejauhmana peranannya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat bercermin pada tahapan-tahapan kemajuan pembangunan dari negara maju. Yang pertama diingat pertanian akan tetap menjadi tulang punggung kehidupan bangsa. Jepang tetap mempertahankan produksi padinya, walaupun untuk itu pemerintah harus memberi subsidi yang besar. Pilihan industri karena memang dari

pengalaman negara-negara maju industri merupakan satu-satunya alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Makin besarnya subsidi terhadap sektor pertanian tertentu di negara-negara maju menunjukkan tingkat produktivitas yang rendah dan tidak mampu bersaing dengan sektor lain.

Produktivitas pekerja di Indonesia mencapai rata-rata sekitar Rp 1,50 juta per pekerja pada tahun 1990: produktivitas sektor manufaktur mencapai sedikit di atas Rp 2,0 juta, sedangkan sektor pertanian kurang dari Rp 600 ribu (Umar Juoro, 1993, Mathias Aroef, 1993). Peningkatan produktivitas pekerja sektor pertanian sangat lambat bahkan cenderung datar; pada tahun 1971 bila dibandingkan dengan angka tahun 1971 produktivitas pekerja sektor pertanian yang sekitar Rp 400 ribu dan hanya naik kurang dari Rp 200 ribu dalam kurun waktu 20 tahun. Sektor manufaktur dalam kurun yang sama naik hampir Rp 1,3 juta, yaitu Rp 750 ribu pada tahun 1971 menjadi Rp 2 juta lebih pada tahun 1990.

Bapak Presiden dalam pidato agustusan (16 Agustus 1993) menegaskan salah satu ciri produktivitas dalam PJPT adalah bahwa produktivitas orang Indonesia harus naik empat kali lipat, dan pendapatan juga harus naik empat kali lipat. Ditargetkan paling tidak tahun 2000 (akhir Pelita VI), pendapatan orang Indonesia harus mencapai paling sedikit 1000 US\$ dan pada akhir PJP-II 2500 US\$. Dari gambaran peningkatan produktivitas tersebut di atas jelas pencapaian target 1000 US\$ akhir Pelita VI atau 2500 US\$ akhir PJP-II, tidak dapat mengandalkan pada sektor pertanian. Bila tambahan angkatan kerja sebagian besar tetap dibebankan kepada sektor pertanian, tambahan pendapatan perkapitanya akan kecil sekali.

Jadi, apa artinya bagi sektor pertanian? Yang jelas pertama-tama adalah pangsa pertanian terhadap PDB akan semakin kecil, walaupun secara absolut tetap harus meningkat. Jumlah orang yang terlibat langsung dalam sektor pertanian akan semakin mengecil, karena tersedot ke industri dan sektor lain di luar pertanian. Sejalan dengan itu, sektor pertanian juga harus mampu memberikan upah yang lebih layak, bila tidak pemerintah harus memberikan subsidi yang makin membesar untuk mempertahankannya. Dalam pada itu tantangan global tampak tidak terelakkan.

Karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, dunia kita telah menjadi semakin sempit dan semakin transparan, dan faktor jarak tidak lagi menjadi kendala. Pada gilirannya dalam konstalasi dunia yang demikian, yang unggul adalah negara yang mampu menciptakan teknologi yang *cost reducing*, yang lebih efisien, yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan sekaligus lebih murah. AFTA telah ditandatangani Januari 1993. Artinya, persaingan global yang semula tidak akan begitu leluasa masuk ke Indonesia, sekarang sudah “resmi” masuk ke dalam negeri. Kita

bersaing dengan negara-negara ASEAN dengan penurunan tarif dan menjadi pasar bebas bersama. Dengan perkataan lain, kita harus bersaing secara internasional, bukan saja untuk pasar internasional, akan tetapi juga untuk pasar dalam negeri.

Hal tersebut jelas memerlukan perubahan sikap yang mendasar. Bagi anggota masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang tadinya bersaing di dalam negeri dengan kondisi buatan sendiri, sekarang harus bersaing berskala internasional. Demikian pula bagi para perencana pembangunan dan pemegang keputusan (*decision maker*). Misalnya salah satu tujuan dari pembangunan sektor pertanian yang selama ini selalu dicanangkan sebagai penampung angkatan kerja sudah harus direvisi. Kebijakan teknologi padat karya tampak sudah kadaluarsa. Demikian pula orientasi para peneliti pertanian yang selama ini difokuskan pada penciptaan paket teknologi tepat guna (baca: teknologi seadanya sesuai dengan kemampuan petani yang terbatas) harus diubah menjadi penciptaan acuan *engineering* sebagai bahan bagi “petani” atau para praktisi pertanian di lapangan untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi ekologis dan kondisi ekonomis yang dihadapinya. Penyuluhan berorientasi produksi harus diubah menjadi penyuluhan berorientasi profit. Beban makro (demi tujuan nasional) yang selama ini dibebankan kepada petani harus segera dicari jalan keluarnya agar petani tidak terus-menerus dirugikan (petani tidak boleh menanam padi rojolele atau cianjur, petani harus menanam kapas, padahal menanam kacang panjang misalnya lebih menguntungkan, dan sebagainya).

(3) *Link and Match* Merupakan Keharusan

Gagasan *Link and Match* antara dunia pendidikan dan dunia pembangunan, khususnya dunia kerja yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - dan sekarang sudah menjadi arah kebijakan untuk diimplementasikan - tampak merupakan suatu keharusan. Dari uraian-uraian di atas jelas bila kita ingin menaikkan pendapatan yang Rp 560 US\$ menjadi lebih tinggi lagi, kita harus memilih jenis-jenis kegiatan (ekonomi) yang mampu menunjang peningkatan pendapatan. Seperti sudah dijelaskan menambah jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pertanian berarti menambah jumlah orang yang berpendapatan di bawah rata-rata. Kita juga dapat bercermin dari negara maju seperti Jepang, Korea, USA dan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara tersebut kita mengenal adanya istilah *sun set industries*, seperti industri garmen dan industri perabotan rumah tangga. Pada tahun 60/70-an industri-industri macam itu masih menjadi kebanggaan mereka (*sun rise industries*). Mengapa demikian, karena industri-industri tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan upah untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan pilihan

kegiatan itu baru berjalan bila didukung oleh penyediaan sumberdaya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang pas untuk itu.

Perbincangan tentang kualifikasi lulusan bagaimana yang diinginkan dunia kerja, apakah lulusan siap pakai, siap kerja atau siap latih seperti tidak habis-habisnya. Bahwa pendidikan memerlukan dana yang besar, dan bahwa kita bukan negara kaya, yang dapat seenaknya menghamburkan uang untuk pendidikan tanpa memperhatikan efisiensi, tanpa memperhatikan berapa banyak lulusan yang menganggur, kami kira kita sepakat semua. Perbincangan yang tidak kunjung selesai itu sebenarnya bertitik pangkal dari perbedaan persepsi tentang kualifikasi lulusan yang diinginkan dengan istilah berbeda-beda itu. Inti permasalahannya adalah sebagian orang menganggap dunia kerja - yang merupakan bagian integral dari dunia pembangunan - adalah dunia yang statis. Orang sering mengartikan membuat dunia pendidikan yang terkait (*link*) dan padan (*match*) dengan dunia kerja adalah terkait dan padan dengan dunia kerja "saat ini". Kita pun, PT Pertanian dan bahkan dunia penelitian di bidang pertanian tampaknya sedikit banyak tergelincir pada pengertian harfiah lulusan "siap pakai". Kurikulum tampak terkotak-kotak - paling tidak di bidang saya agronomi dibuat lebih untuk memberikan "hafalan" paket teknologi ketimbang memberikan dasar yang kuat untuk melakukan *engineering* di lapangan. Demikian pula corak penelitiannya lebih mengarah kepada penelitian verifikasi (*experiment*), sedangkan penelitian eksploratif atau penelitian deskriptif-eksplanatif kurang mendapat tempat. Bahkan di beberapa PT Pertanian yang saya kenal penelitian akademiknya (baca: penelitian yang dilaksanakan sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, S1, S2 ataupun S3) telah dipaku dengan format penelitian verifikasi.

Salah satu sebabnya barangkali karena kita tanpa sadar terbius oleh tuntutan dan kemudian oleh keberhasilan pembangunan pertanian periode pertama (*inward looking*) tersebut di atas. Keberhasilan swasembada beras memang terjadi karena kita berhasil - dengan bantuan rekayasa sosial - menerapkan paket teknologi budidaya padi dengan ketat. Kebetulan pula paket teknologi budidaya padi mempunyai "keberlakuan" yang cukup luas. Karena dua faktor ekologis utamanya sama, di manapun padi (sawah) ditanam; struktur tanah lumpur dan status air (sawah irigasi teknis) yang hampir seratus persen dapat dimanipulasi sesuai kebutuhan, serta erosi yang sangat minimal. Lahan kering? Pada lahan kering, kondisi kedua faktor ekologis utama tersebut, disertai dengan erosi dan pencucian hara mineral yang sulit dikendalikan, menyebabkan tidak mungkin kita membuat paket teknologi yang keberlakuannya cukup luas. Dari lokasi ke lokasi - bahkan lokasi yang bersebelahan pun - dan dari waktu ke waktu kondisi ekologisnya dapat berbeda tajam.

Ketertinggalan kita dari dunia kerja, dapat pula kita simak dari sosok penyuluh pertanian di lapangan. Di lahan kering, terutama pada tanaman-tanaman komersial hortikultura mereka sering tidak mampu berbuat banyak, karena ketertinggalan - baik qua pengetahuan maupun qua keterampilan - oleh petani. Ketinggalan kita dapat juga kita simak dari buku-buku pertanian, khususnya buku-buku pedoman bercocok tanam yang beredar di pasaran, baik itu buku yang resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun perorangan dan LSM. Kedalaman materi-materi buku tersebut tidak pernah bergeser dari buku-buku terbitan lama, misalnya karangan Kaslan Tohir atau karangan Suparna Satyadireja. Padahal kalau kita lihat di lapangan, khususnya di perusahaan-perusahaan yang bermodal besar, teknologi itu sudah lama ditinggalkan. Di masyarakat awam bahkan komoditas pertanian yang unggul selalu diberi merek "bangkok". Perusahaan pertanian besar, khususnya di bidang hortikultura hampir tidak pernah menggunakan tenaga ahli bangsa sendiri. Perkebunan pisang di Lampung, dan di Seram menggunakan tenaga ahli dari Pilipina. Beberapa Perkebunan Jeruk dan Mangga yang baru bangkit di Jawa Timur menggunakan tenaga dari Malaysia dan Thailand. Kita juga mengenal jambu bangkok dipopulerkan oleh perusahaan "orang" Thailand di Karawang. Simak pula beberapa "warga asing" yang melihat peluang di bidang pertanian dan membuka usaha di bidang pertanian.

Paparan-paparan tersebut kiranya cukup memberikan gambaran bahwa dunia pendidikan pertanian kita tidak *link and match* dengan dunia kerja yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis.

(4) Pendidikan Tinggi (PT) Pertanian adalah Pengemban *Design for The Future* Pembangunan Pertanian di Indonesia

Bila kita simak kembali tuntutan GBHN 1993 yang dikutip pada awal tulisan ini, maka gagasan *link and match* itu bagi PT Pertanian pada dasarnya merupakan harapan peran (*role expectation*), yang dituntut dimainkan dalam rangka menciptakan manusia produktif di bidang pertanian. Pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan implementasi harapan peran tersebut.

Dunia kerja sebagai bagian yang integral dari dunia pembangunan harus dipersepsi sebagai dunia yang dinamis, yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya dunia iptek. Dalam pada itu, proses pendidikan tinggi (baca S1) memerlukan waktu, katakanlah rata-rata 5-6 tahun sampai menghasilkan lulusan. Dengan demikian kurikulum PT Pertanian harus dirancang untuk mengantisipasi sosok pembangunan pertanian pada masa 5-10 tahun yang akan datang, dan bukan bercermin kepada sosok dunia kerja saat ini. Jadi, pada dasarnya PT Pertanian harus dirancang untuk mengantisipasi sosok pembangunan pertanian

pada masa 5-10 tahun yang akan datang, dan bukan bercermin kepada sosok dunia kerja saat ini. Jadi, pada dasarnya PT Pertanian harus mampu merancang masa depan tuntutan pembangunan pertanian, paling tidak untuk 5-10 tahun yang akan datang.

Paparan-paparan di butir (3) di atas kiranya cukup memberikan gambaran kasar tentang corak pembangunan pertanian masa yang akan datang tersebut. Salah satu ciri utama pertanian masa datang adalah berdiri di garis depan dalam bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi teknologi unggulan yang mampu bersaing dalam menghasilkan dan memasarkan produk yang murah dan berkualitas tinggi. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja suatu negara dalam era globalisasi. Jadi, pertanian masa datang sangat tergantung kepada hasil-hasil penelitian, baik penelitian dasar (sebagai bahan baku untuk pengembangan teknologi) maupun penelitian terapan atau penelitian pengembangan teknologi.

Penelitian berdimensi banyak, PT yang aktif dan mampu melakukan penelitian bermutu, yaitu penelitian yang mampu mengantisipasi kebutuhan dunia pembangunan, konsekuensi logisnya akan mampu juga menghasilkan lulusan (dharma pendidikan) yang berkualitas, yang pada gilirannya juga akan mampu melayani masyarakat (dharma pengabdian pada masyarakat) secara lebih bermakna. Demikian pula hanya PT yang terlibat langsung dalam pergulatan pengembangan ilmu dan teknologi yang dapat mengantisipasi kebutuhan dunia pembangunan masa depan dengan baik. Jadi, isu sentral *link and match* adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi PT Pertanian agar mampu meningkatkan kiprahnya dalam penelitian-penelitian, baik dalam artian jumlah maupun mutunya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana mengantisipasi kebutuhan dunia kerja yang selain secara dinamis berkembang terus, juga spesifikasinya mungkin sangat beragam; yang diinginkan dunia kerja apakah lulusan berkualifikasi spesialis atau lulusan berkualifikasi generalis. Dengan perkataan lain, sejauh mana pendigitalan ilmu dan/atau teknologi dapat diterjemahkan ke dalam jurusan, atau program studi.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya bila terlebih dahulu kita menduduksoalkan kriteria kualifikasi ideal seorang sarjana: Seorang sarjana adalah seorang yang mampu membaca fenomena-fenomena yang ditemuinya, dan menduduksoalkannya dalam kerangka teori yang ada dirasa belum memadai, dia akan terangsang untuk mengembangkan teori baru atau mengembangkan teori yang ada, dan begitu seterusnya. Dengan demikian seorang sarjana adalah seseorang yang selalu berdiri di garis depan dan menjalani proses “menjadi” yang tidak kunjung selesai. Kualifikasi ideal

seorang sarjana dapat pula dirumuskan dengan tiga kata kunci: analitik, kreatif, dan eksploratif.

Kembali kepada permasalahan bagaimana membuat agar kualifikasi lulusan *match* dengan kebutuhan dunia kerja. Secara ideal jawabannya dapat mengacu kepada kriteria ideal seorang sarjana tersebut di atas. Artinya, bila PT Pertanian dapat mencetak lulusan yang mendekati kualifikasi ideal tersebut, sudah tentu permasalahan *match* dengan dunia kerja itu tidak perlu diperbincangkan lagi. Namun, secara operasional tidak mudah menjabarkannya. Memang membuat kecocokan yang selalu pas itu tidak mudah, karena adanya proses dinamisa perubahan pada kedua subsistem. Jalan keluar yang diusulkan oleh Seminar *link and match* di Bandung (Universitas Padjajaran, 1993) untuk mengantisipasi kebutuhan dunia kerja yang beraneka ragam dan berubah dengan cepat itu adalah melalui pengembangan kurikulum yang lentur. Pendigitan bidang studi mungkin cukup sampai jurusan atau maksimal dua subdigit (program studi) di bawah jurusan. Kelenturan dirancang dengan mengembangkan sebanyak mungkin Mata Kuliah Keahlian (MKK). MKK ini dipilih oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan konsultasi dengan dunia kerja. Katakanlah 40 persen dari jumlah SKS. Dalam pada itu, Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) harus dirancang benar-benar dapat memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mengantisipasi secara kritis dan kreatif. MKK apa pun yang dipilihnya nanti (40 persen dari jumlah SKS) untuk penyelesaian studi akhirnya. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi bekal bagi lulusan nanti, seandainya lapangan kerja yang dimasukinya pada kenyataannya tidak pas benar dengan MKK pilihannya.

Untuk merealisasikan keterkaitan dan kepadanan PT dengan dunia kerja, selain memerlukan penataan kurikulum berikut implementasinya terhadap pendigitan ilmu/teknologi dan penjurangan program studi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai. Mathias Aroef (1993) mengusulkan dibentuknya lembaga tripartit yang merupakan forum komunikasi antara PT, dunia usaha sebagai pemakai lulusan dan pemerintah. Kelembagaan ini selain berskala nasional juga harus tercermin dalam unit terkecil di universitas, yaitu di jurusan atau program studi. Dalam kaitan ini wujud kelembagaannya mungkin semacam *Job Placement Office*. Dalam pada, itu senat universitas pun perlu ditingkatkan keterlibatannya. Demikian pula keanggotaan dewan penyantun perlu ditambah dengan tokoh-tokoh yang terlibat langsung dalam dunia usaha atau dunia kerja.

V. CATATAN PENUTUP

Dalam makalah ini telah dibahas beberapa gagasan bagaimana mengoptimalkan implementasi gagasan *link and match* antara dunia pendidikan tinggi dengan

dunia pembangunan khususnya dunia kerja. Pada dasarnya gagasan *link and match* merupakan tuntutan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang dituntut oleh dunia pembangunan sesuai amanat GBHN 1993.

Upaya pengoptimalan dapat dimulai dari mengantisipasi arah pembangunan pertanian masa yang akan datang, baik dalam konteks pembangunan sektor pertanian sebagai kelanjutan pembangunan pertanian selama PJP-I, maupun dalam konteks tantangan global. Dari pelacakan kedua visi tersebut tampak isu sentralnya adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi PT Pertanian untuk secara langsung dan penuh terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Hanya dalam kondisi demikian PT Pertanian mampu menghasilkan lulusan yang *match* dengan perkembangan dunia pembangunan khususnya dunia kerja.

Implementasi berikutnya adalah menata kembali sistem PT secara keseluruhan, antara lain: pendigitan ilmu/teknologi atau kelompok ilmu/teknologi serta penjabarannya dalam penjenjangan dan pembentukan jurusan/program studi; mengembangkan kurikulum yang lentur dengan menawarkan sejumlah MKK yang dapat dipilih oleh mahasiswa atas bimbingan dosen dan konsultasi dengan dunia kerja; mengembangkan kelembagaan tripartit serta mengoptimalkan fungsi senat dan dewan penyantun.

VI. BAHAN BACAAN

- Anonim, 1993. Perlu Deregulasi Pendidikan Nasional. Majalah Fokus No. 13 hal. 10-12.
- Aos M. Akyas, 1987. Matra Keilmuwandan Citra Program Pendidikan S1 Budidaya Tanaman di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Kertas Kerja Diskusi Pengembangan Kurikulum Faperta Unpad, Jatinangor.
- Bambang Soehendro, 1993. Laporan Tahunan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 1992/1993. Jakarta.
- Gunawan Satari, 1993. Sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Peragi Pada Acara Pembukaan Peresmian Simposium Organisasi Profesi dan Asosiasi Bidang Pertanian dan Kongres V Peragi. Jakarta.
- Harsja W. Bachtiar, 1993. Sarjana Lulusan Universitas di Indonesia. Proseding Seminar Ilmiah: Optimasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Menjawab Link and Match Antara Dunia Pendidikan dengan Dunia Pembangunan, Khususnya Dunia Kerja. Fakultas Pertanian Unpad Press.
- Livy Winata Gunawan dan Sri Setyati Harjadi. 1993. Bioteknologi Dalam Hortikultura Guna Menjawab Tantangan Industrialisasi Pertanian Dalam PJPT II. Jakarta.

- Matthias Aroef, 1993. Bagaimana Mewujudkan Gagasan *Link and Match*. Proseding Seminar Ilmiah: Optimasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Menjawab Link and Match Antara Dunia Pendidikan Dengan Dunia Pembangunan, Khususnya Dunia Kerja. Fakultas Pertanian Unpad Press.
- Panitia Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Link and Match*. Jakarta.
- Ristono, 1991. Farm Household Population in Japan and its Economical Condition. Forum Statistik. Biro Pusat Statistik. Jakarta. No. 1-2 hal. 1-21.
- Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi Pada Kongres V Peragi dan Simposium Nasional Organisasi Profesi/Asosiasi Pertanian. Jakarta.
- Umar Juoro, 1993. Akumulasi Modal Manusia dan Pilihan Teknologi. SINTESIS No.5.
- Wardiman Djojonegoro, 1993. Integrasi Pendidikan dan Sumberdaya Manusia. Sintesis No.4. hal. 53-59.